



**KEPUTUSAN  
KONGRES BAHASA INDONESIA I-V  
TAHUN 1938-1988**

06

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JAKARTA  
1993**

KATA PENGANTAR



Buku ini merupakan Kongres Bahasa Indonesia I-V diterbitkan dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia VI yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 1993 di Hotel Indonesia, Jakarta.

## **KEPUTUSAN**

# **KONGRES BAHASA INDONESIA I-V**

Melihat bahwa ini kali pertama Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta, maka keputusan yang diambil oleh Kongres Bahasa Indonesia I-V adalah sebagai berikut:

## **TAHUN 1938-1988**

Selamat berkegiatan

PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JAKARTA**

**1993**

## KATA PENGANTAR



Buku *Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I-V* diterbitkan dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia VI yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1993 di Hotel Indonesia, Jakarta.

Melalui buku ini para peserta Kongres diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta diharapkan pula agar para peserta dapat berpartisipasi lebih aktif dalam Kongres VI.

Selamat berkongres.

Perpustakaan Pusat "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa"

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| No Klasifikasi        | No Indek       |
| 499.210.6<br>KEP<br>K | 605<br>6-12-93 |
|                       | Tgl            |
|                       | Ttd            |

**Panitia**

## DAFTAR ISI

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR . . . . .                         | ii  |
| DAFTAR ISI . . . . .                             | iii |
| POETOESAN KONGRES BAHASA INDONESIA . . . . .     | 1   |
| KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA II . . . . .  | 4   |
| KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA III . . . . . | 21  |
| KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA IV . . . . .  | 37  |
| KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA V . . . . .   | 48  |



**POETOESAN KONGGERES  
BAHASA INDONESIA  
Solo, 25--28 Juni 1993**

- I. Sesoedah mendengarkan dan memperkatakan praeadvies toean Mr. Amir Sjarifoeddin tentang "Menjesoeaikan kata dan faham asing ke dalam bahasa Indonesia", maka Konggres ternjata pada oemoemnja setoedjoe mengambil kata-kata asing oentoek ilmoe pengetahoean. Oentoek ilmoe pengetahoean jang sekarang, Konggres setoedjoe kalaoe kata-kata itoe diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah didjalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan kepada satoe badan.
- II. Sesoedah mendengarkan dan bertoekar pikiran tentang praeadvies toean St. Takdir Alisjahbana hal "Pembaharoean bahasa dan oesaha mengatoernja", maka sepandjang pendapatan Konggres, soedah ada pembaharoean bahasa jang timboel karena ada tjara berpikir jang baroe, sebab itoe merasa perloe mengatoer pembaharoean itu.
- III. Sesoedah mendengarkan praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana dalil ke-IV dan Mr. Muh Yamin, maka Konggres berpendapatan bahwa gramatika jang sekarang tidak memoeaskan lagi dan tidak menoentoet woedjoed bahasa Indonesia, karena itoe perloe menjoesoen gramatika baroe, jang menoeroet woedjoed bahasa Indonesia.
- IV. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, berkonggres di Solo pada tanggal 25--27 Juni 1938, setelah mendengarkan praeadvies toean K. St. Pamoentjak tentang "Hal edjaan bahasa Indonesia", dan setelah bertoekar pikiran tentang hal itoe, maka jang hadir berpendapat: bahwa edjaan baru tidak perloe diadakan, sampai Konggres mengadakan edjaan sendiri, bahwa edjaan yang soedah berlakoe, jaitoe edjaan van Ophuysen sementara boleh diterima,

tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhaan, perloe dipikirkan peroebahan seperti jang diseboetkan oleh praeadviseur, karena itoe berpengharapan:

1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjaan jang terseboet;
2. soepaja fractie Nasional di Volksraad mendesak Pemerintah oentoek memakai edjaan seperti jang dimaksoedkan oleh Konggres;
3. soepaja perhimpoean kaoem goeroe soeka membantoe poetoesan Konggres.

V. Setelah mendengar praeadvies toean Adi Negoro, tentang "Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran", maka sependjang pendapatan Konggres, soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itoe berharap soepaja Perdi bermoepakat tentang hal itoe dengan anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoek oleh Konggres jang baroe bersama-sama dengan Hoofdbestuur Perdi.

VI. Sesoedah mendengarkan praeadvies Ki Hadjar Dewantara dalil jang ke-X jang disokong oleh toean R.M. Ng. dr. Poerbotjaraka, maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoekan: bahwa Konggres berpendapatan dan mengandjoerkan, soepaja didalam pērgoeroean menengah diadjarkan djoega edjaan internasional.

VII. Sesoedah mendengarkan praeadvies toean Soekardjo Wirjopranoto tentang "Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan", jang dioetjapkan dan dipertahankan oleh toean R.P. Soeroso, maka Konggres berpendapatan dan mengeloearkan pengharapan:

Pertama: Soepaja moelai saat ini bahasa Indonesia dipakai dalam segala badan perwakilan sebagai bahasa perantara (voertaal), Kedua: mengeloearkan penghargaan soepaja menoendjang oesaha oentoek mendjadikan bahasa Indonesia jang sjah dan bahasa oentoek oendang-oendang negeri.

- VIII. Sesoedah mendengar praeadvies toean Sanoesi Pane tentang "Instituut Bahasa Indonesia" dan mendengar pendirian Komite tentang hal itoe; maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan: soepaja diangkat soeatoe komisi oentoek memeriksa persoalan mendirikan Instituut Bahasa Indonesia dan Konggres mengharap soepaja mengoemoemkan pendapatan komisi tentang soal yang terseboet.
- IX. Sesoedah mendengar praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh Yamin dan Sanoesi Pane, maka Konggres berpendapatan, bahwa oentoek kemadjoean masjarakat Indonesia, penjelidikan bahasa dan kesoesasteraan dan kemadjoean keboedajaan bangsa Indonesia, perloe didirikan Pergoeroean Tinggi Kesoesasteraan dengan selekas-lekasnya.

## **KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA II**

### **Medan, 28 Oktober—2 November 1954**

Dalam Kongres Bahasa Indonesia I sudah diputuskan bahwa diadakan Kongres Bahasa Indonesia II, tetapi baru setelah kemerdekaan gagasan itu dilaksanakan, yaitu di Medan, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Kota Medan dipilih sebagai tempat Kongres, karena menurut Mr. Muh. Yamin, Menteri PPK pada waktu itu, di kota itulah Bahasa Indonesia dipakai dan terpelihara, baik dalam kalangan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Berlainan dengan Kongres Bahasa Indonesia I yang diselenggarakan atas prakarsa pribadi-pribadi, Kongres Bahasa II ini diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II ini disusun Panitia Penyelenggara sebagai berikut.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Ketua</b>        | : Sudarsana            |
| <b>Wakil Ketua</b>  | : Dr. Slametmuljana    |
| <b>Panitera I</b>   | : Mangatas Nasution    |
| <b>Panitera II</b>  | : Drs. W.J.B.F. Tooy   |
| <b>Panitera III</b> | : Nur St. Iskandar     |
| <b>Anggota</b>      | : Pudjowijatno         |
| <b>Anggota</b>      | : Amir Hamzah Nasution |
| <b>Anggota</b>      | : La Side              |

Ditambah dengan Penasihat Panitia yang terdiri atas beberapa cendekiawan. Di Medan disusun Panitia Penerima Kongres yang diketuai oleh W. Simandjuntak, dengan pelindung Gubernur Sumatra Utara dan Ketua Kehormatan Walikota Medan serta para penasihat yang terdiri atas tokoh-tokoh kota Medan.

Seperti halnya Kongres I, Kongres Bahasa Indonesia II itu merupakan peristiwa yang menyangkut bukan hanya para ahli bahasa melainkan juga

masyarakat luas. Bahkan Presiden Soekarno, yang pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia, membuka secara resmi Kongres Bahasa Indonesia itu di Gedung Kesenian Medan pada pukul 8 pagi. Istri Presiden pulalah yang membuka pameran buku (dalam laporan resmi ia disebut P.J.M Ibu Karno Ny. Fatmawati).

Dalam Kongres itu kemudian dipilih pimpinan Kongres yang terdiri atas Mr. Mahadi

Dr. A. Sofjan

Prof. Prijana

Kongres itu merupakan peristiwa besar bagi masyarakat Medan. Kegiatannya bukan hanya rapat-rapat, melainkan juga pameran buku-buku, malam kesenian dari daerah Aceh dan Sumatra Utara. Yang resmi tercatat sebagai peserta Kongres berjumlah 302 orang yang datang dari pelbagai daerah Indonesia, juga dari tanah Semenanjung, dari Negeri Belanda, dari Prancis, dan dari India.

Kongres dibagi atas beberapa seksi yang masing-masing membicarakan topik tertentu sebagai berikut.

#### SEKSI A

1. Tata Bahasa Indonesia
2. Dasar-dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin

Praeadvies Prof. Dr. Prijana

Praeadvies Prof. Dr. Prijana

#### SEKSI B

1. Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan dan Administrasi

Praeadvies Mr. A.G.Pringgodigdo

2. Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan dan Administrasi

Praeadvies Mr. Kuntjoro  
Purbopranoto

## SEKSI C

1. Bahasa Indonesia dalam Kuliah dan Pengetahuan Praeadvies Dr. Pryohutomo
2. Kamus Etimologis Indonesia Praeadvies Dr. Pryohutomo

## SEKSI D

1. Bahasa Indonesia dalam Film Praeadvies Inu Perbantarasi (alm.)
2. Bahasa Indonesia dalam Pergaulan Sehari-hari Praeadvies Madong Lubis
3. Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi Praeadvies Bahrum Rangkuti

## SEKSI E

1. Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pers Praeadvies Ketua PWI (T. Sjahril)
2. Bahasa Indonesia dalam Pers Praeadvies Adinegoro
3. Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio Praeadvies Kamarsjah

Beberapa keputusan yang menarik dapat disebutkan di sini. Keputusan yang dianggap sangat penting ialah saran agar dibentuk badan yang kompeten yang bertugas untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Hal yang bersangkutan dengan ejaan, Kongres mengusulkan supaya diadakan pembaruan ejaan. Kongres juga memberikan perhatian pada pemakaian bahasa dalam undang-undang dan administrasi. Kongres berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tidak mengalami kesulitan. Kongres juga menyarankan supaya digiatkan pemakaian istilah ilmiah internasional dan penggalan istilah dari bahasa daerah yang serumpun. Hal yang bersangkutan dengan bahasa dalam film, Kongres menganjurkan supaya



pembuatan film memakai bahasa Indonesia yang baik, tetapi tidak boleh mengadakan paksaan untuk mengadakan bahasa Indonesia yang sejenis (uniform), karena dalam menciptakan sebuah film haruslah disesuaikan bahasanya dengan cerita, yang berbeda-beda menurut suasana dan daerah". Hal yang juga menarik adalah resolusi tentang bahasa Indonesia dalam pers dan radio, yang menyatakan bahwa "Bahasa Indonesia di dalam pers dan radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak, karena merupakan bahasa umum yang langsung mengikuti pertumbuhan berbagai fungsi masyarakat". Di samping kertas kerja, juga didengarkan prasaran dari para sarjana luar negeri tentang bahasa Indonesia di luar negeri, antara lain dari Prof. Berg dan Dr. Teeuw.

Sebagai tindak lanjut keputusan Kongres tersebut, Pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun panitia pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan sejarahnya yang panjang dari tahun 1956 hasil kerja panitia ini menjadi embrio Ejaan Yang Disempurnakan yang diresmikan pada tahun 1972. Memang ada keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang lain, tetapi yang paling meninggalkan bekas tentulah soal ejaan tersebut. Pendek kata, Kongres II itu ada tindak-lanjutnya. Keputusan resmi Kongres Bahasa Indonesia II itu secara lengkap dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

#### **Keputusan seksi A: Dasar-dasar Edjaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin.**

Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tgl. 2 Nopember 1954 di Medan, setelah membatja, menelaah dan membahas praedvies yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Prijana, memutuskan:

1. mengusulkan kepada Pemerintah mengadakan suatu Badan Kompeten yang diakui oleh Pemerintah untuk: a. dalam djangka pendek menjusun Tatabahasa Indonesia yang normatif bagi S.R., S.L.P., S.L.A. dll.; b. dalam djangka pandjang menjusun suatu tatabahasa deskriptif yang lengkap.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah, agar anggota2 Badan tersebut terdiri dari:
  - a. seorang sardjana bahasa, sebagai ketua.

- b. seorang dari Pers sebagai anggota.
  - c. seorang dari Radio sebagai anggota.
  - d. beberapa orang ahli bahasa, sebagai anggota.
  - e. beberapa orang sarjana bahasa, sebagai penasihat.
  - f. d.l.l. jang dianggap perlu.
3. Memberi tugas kepada Badan tersebut untuk menjiapkan rentjana dalam djangka waktu jang ditentukan.
  4. Mengusulkan agar Badan tersebut dipimpin oleh seorang jang tjakap memimpin dan memang menundjukkan kegiatannya dalam perkembangan bahasa Indonesia.
  5. Mengusulkan supaja badan tersebut selalu mengadakan koordinasi dengan badan2 jang ada sangkut-pautnya dengan bahasa.
  6. Mengusulkan agar Badan tersebut bekerdja dengan sistim diachronis dengan menentukan tanggal tertentu sebagai waktu titik permulaan penjelidikannya.
  7. Mengusulkan agar Pemerintah berusaha supaja hasil Pekerdjaan Badan tersebut dijadikan suatu tatabahasa jang dilindungi dengan undang2.
  8. Bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju jang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masjarakat Indonesia sekarang.

Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d tgl. 2 Nopember 1954 di Medan, setelah membatja, menelaah dan membahas preadvies jang dikemukakan oleh Sdr. Prijana, memutuskan:

- I. Menjetudjui sedapat-dapatnja menggambarkan 1 fonem dengan 1 tanda (huruf).
- II. Menjetudjui menjerahkan penjelidikan dan penetapan dasar2 edjaan selandjutnja kepada suatu badan kompeten jang diakui oleh Pemerintah.
- III. Mengusulkan agar Badan tersebut berusaha menjusun:
  - a. Suatu aturan edjaan jang praktis untuk keperluan sehari-hari dengan sedapat mungkin mengingat pertimbangan ilmu.
  - b. Suatu "logat Bahasa Indonesia" jang halus, berdasarkan penjelidikan jang saksama dengan mempergunakan alat2 modern.

- IV. Menjetudjui agar edjaan untuk kata2 asing jang terpakai dalam bahasa Indonesia, ditetapkan sesungguhnya penjusunan edjaan bahasa Indonesia asli terlaksana, dengan pengertian bahwa untuk kata2 Arab diadakan kerdja sama dengan Kementerian Agama.
- V. Mengusulkan edjaan itu ditetapkan dengan undang2.

#### **Keputusan Seksi B: Bahasa di dalam Perundang-undangan dan Administrasi**

Seksi B dalam Kongres Bahasa Indonesia, jang dilangsungkan di Medan sedjak tanggal 28 Oktober 1954 s/d tgl. 2 Nopember 1954, setelah membatja praeadvies saudara Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan setelah membatja serta mempertimbangkan praeadvies saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto, mengambil kesimpulan2 seperti teriring di bawah ini:

- I. Supaja Pemerintah segera membentuk Panitia Negara, seperti jang dimaksudkan dalam Pasal 145 U.U.D.S., dengan ketentuan bahwa disamping tugas jang dimaksud dalam pasal tersebut, supaja kepada Panitia dibebankan djuga kewadajiban sebagai berikut:

- A. Mengadakan pembetulan/penjempurnaan, jang dipandang perlu dalam bahasa Indonesia di dalam Undang2.

Undang2 Darurat, Peraturan2 Pemerintah dan Peraturan2 Negara jang lain; misalnja:

1. Kata "kebutuhan", sebab kata ini adalah kata tjabul dalam Bahasa Daerah. Umumnja, kata2 tjabul dari Bahasa Daerah djanganlah dipergunakan.
2. Kata "retributie" (lihat pasal 2 L.N. 1953 No. 4). Demikian djuga seperti kata2 "rel", "ondernemeng" dalam T.L.N. No. 353, "diimporteer", "pabrikasi rokok", di dalam T.L.N. No. 350, "legaliseer", "aparatur", T.L.N. 351, "inrichting van het onderwijs" T.L.N. 351. Umumnja kata2 asing jang mudah mendapat penggantianja djangan dipergunakan.

- B. Memeriksa bahasa rantjangan Undang2 Darurat, dan Peraturan2 Negara jang lain, sebelum ditetapkan.

- C. Mendjaga supaya istilah2 hukum bersifat tetap, terang dan djangan berobah sebelum mendapat persetudjuan Panitia tersebut.
- II. Didalam Panitia tersebut di sub I didudukkan sebagai anggota selain dari pada ahli2 Hukum dan Bahasa, djuga ahli2 Adat, ahli2 Agama dan ahli2 Hukum Agama.
- III. Didalam Seksi Hukum dari Komisi Istilah hendaklah djuga didudukkan ahli2 Hukum Agama sebagai anggota.
- IV. Untuk mentjapai KESERAGAMAN istilah Hukum jang dipakai dalam Dunia Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi dan para Sardjana Hukum pada waktu2 jang tertentu mengadakan pertemuan.
- V. Supaja pihak Pemerintah tetap memakai istilah jang sama untuk "satu pengertian hukum, misalnja: "atas kuasa Undang2", (Undang-Undang Dasar pasal 101 ayat 1) contra "berdasarkan" dalam L.N. 1953 no. 4.
- VI. Supaja sesuatu istilah senantiasa ditulis dalam bentuk jang sama, misalnja: "diubah", "dirubah", "dirobah", (L.N. 1954 no. 39). L.N. 1953 no. 4 pasal 1). "Dewan Pemerintah Harian", (T.L.N. 353) contra "Dewan Pemerintah Daerah", (U.U.R.I. 1948 no. 22).
- VII. Menjetudjui seluruhnja kesimpulan2 dari no. 1 s/d 6, jang diperbuat oleh saudara Mr. Koentjoro Poerbopranoto pada achir praeadviesnja, jang berbunji sebagai berikut:
1. Bahasa-Hukum Indonesia adalah bahagian dari bahasa umum Indonesia jang meliputi lapangan Hukum dalam masjarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penjelenggaraan pengadilan oleh instansi2 jang diakui oleh undang-undang. Instansi2 itu adalah instansi2 resmi Pengadilan pun pula badan2 atau petugas2 jang menurut Adat dan Agama disertai penjelenggaraan Hukum Adat, dan Hukum Agama, termasuk Pengadilan Swapradja (dimana masih ada).

2. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan dan administrasi adalah bahagian bahasa-hukum Indonesia tertulis, yang dipergunakan dalam perundang-undangan dan administrasi, yaitu oleh instansi2 resmi yang disertai dengan penjelenggaraan administrasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pengitaban hukum (codificatie) dan pentjataan hukum (rechtsregistratie).
3. Persoalan2 mengenai bahasa Indonesia pada umumnya pula terhadap dan pengaruh pada bahasa Hukum (termasuk pula bahasa perundang-undangan dan bahasa administrasi) kita.
4. Dalam mencari, menggali, menghimpun dan membentuk istilah Hukum Indonesia sejojanja dipakai dasar:
  - a. bahan-bahan dari bahasa daerah yang meliputi seluruh daerah Hukum Indonesia;
  - b. kata-kata istilah dari Bahasa Asing yang menurut sedjarah dan pemakaiannya sudah memperoleh kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia;
  - c. kata-kata istilah bentukan baru yang menurut perhitungan baik berdasarkan isinja maupun pengutjapannya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.
5. Dalam lapangan administrasi sangat besar gunanja kesamaan bentuk atau keseragaman guna melantjarkan penjelesaian surat-menjurat dan memudahkan pemetjahan soal yang dihadapi.

Berhubung dengan itu lazimlah dipakai dalam administrasi tjara penjelesaian soal yang disebut "afdoening volgens antecedent/ precedent".
6. Adalah satu keuntungan besar dalam sedjarah Kebudajaan Bangsa kita, bahwa sebagai salah satu hasil revolusi Bangsa Indonesia telah dapat ditetapkan satu Bahasa Kesatuan dan Bahasa Resmi yaitu Bahasa Indonesia.

## **Keputusan Seksi C: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah dan Kamus Etimologi Indonesia**

Seksi C. Kongres Bahasa Indonesia 1954, setelah dalam sidang2nja memperbintjangkan praeadvies Prof. Dr. Prijohutomo tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan Kamus Etimologi Indonesia, mengamil keputusan/kesimpulan untuk disarankan kepada sidang Pleno Kongres jang dapat dirumuskan demikian:

A. Mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah Kongres berpendapat:

1. Bahasa Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannja kearah kesempurnaan pada dewasa ini, tidaklah mengalami banjak kesukaran dalam pemakaiannja sebagai bahasa ilmiah.
2. Maka untuk lebih menjempurnakan bahasa Indonesia mendjadi bahasa ilmiah dan kebudayaan didalam arti seluas-luasnja dan sedalam-dalamnja, perlu ditjiptakan iklim dan suasana sedemikian rupa, sehingga bahasa tersebut dapat berkembang setjara mulus sempurna.
3. Iklim dan suasana tersebut hanya mungkin ada djika ditetapkan dengan tegas politik bahasa sebagai tindakan organik terhadap pasal 4 U.U.D.S. jang berbunji "Bahasa Resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia". Didalam politik itu sekurang-kurangnya haruslah ditetapkan usaha2 jang njata didalam rangka pembangunan nasional antara lain:
  - a. Pendirian Djawatan Penterdjemah Negara jang kompeten, dengan diberi perlengkapan personalia, peralatan, dan keuangan jang tjukup.
  - b. Sikap terhadap kedudukan bahasa daerah, sebagai sumber kebudayaan dan kekajaan bahasa nasional.
  - c. Sikap tegas terhadap bahasa asing, misalnja penindjauan kembali pengadjaran bahasa Inggeris disekolah landjutan jang sekarang dilakukan dengan setjara meluas dan merata, dengan kemungkinan menggantinja dengan sekolah2 bahasa asing (Foreign Linguistic Schools) untuk kepentingan negara dalam hubungan Internasional.
  - d. Adanja mimbar kuliah bahasa Indonesia, bahasa2 daerah, antara

lain Melaju, Djawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, bahasa2 daerah Tpanuli, Atjeh d.l.l.

- e. Adanja mimbar kuliah bahasa asing terutama bahasa2 tetangga, misalnja bahasa Arab, Sanskerta, Urdu, Tionghoa, d.l.l.
- f. Huruf Arab jang biasa disebut huruf Melaju supaja tetap diadjarkan disekolah-sekolah di daerah jang memakainja.

B. Mengenai ichtiar untuk memperlengkap kata2 jang diperlukan didalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka Kongres Bahasa Indonesia mengandjurkan:

- 1. Istilah2 jang telah biasa dipakai saat ini, diakui.
- 2. Istilah jang telah disiarkan oleh Komisi Istilah, supaja disaring dengan djalan berpegang kepada pengertian keseluruhannja, dan tidak hanja merupakan penterdjemahan kata2 bahagiannja.
- 3. Semua istilah Internasional dalam lapangan ilmiah dan kebudayaan diterima dengan ketentuan diselaraskan dengan lisan Indonesia, apabila perlu dan tidak merusak pengertiannja.
- 4. Untuk memperkaja perbendaharaan kata bahasa Indonesia, hendaklah terutama diambil kata2 dari bahasa daerah dan bahasa jang serumpun.

### C. Andjuran2

- 1. Mengandjurkan supaja para sardjana Indonesia mengadakan pertemuan2 keahlian untuk membahas ilmu pengetahuan dalam lapangannja dengan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- 2. Mengandjurkan kepada para sardjana untuk mengarang buku tentang keachliannja dalam bahasa Indonesia.
- 3. Mengandjurkan kepada Pemerintah untuk meberikan penghargaan dan honorarium jang tjukup menarik untuk setiap karangan dan hasil keachlian dan kesusasteraan jang diterima.
- 4. Mengadakan perpustakaan untuk semua sekolah dan masjarakat jang tjukup lengkap.

Mengenai praeadvies tentang Kamus Etimologi Indonesia, Kongres berpendapat supaya Pemerintah segera mendirikan sebuah Lembaga untuk menyusun Kamus Etimologi Indonesia.

Selandjutnja Panitia Perumus mengambil keputusan untuk mengusulkan supaya mengumumkan kepada masyarakat:

- a. Pedato pembangkang utama Sdr. Hamka.
- b. Pedato Herman Busser.
- c. Pedato Prof. Dr. A.A. Fokker.

### **Keputusan Seksi D1: Bahasa Indonesia dalam Pergaulan Sehari-hari**

1. Didalam pergaulan sehari-hari, jaitu didalam perhubungan antara manusia jang bersifat bebas dilapangan hidup jang bebas hendaklah senantiasa diusahakan dan diutamakan pemakaian Bahasa Indonesia sebanjak-banjaknja di dalam bentuk jang sebaik-baiknja.
2. Untuk mentjapai tudjuan ini, haruslah ada usaha pengembangan Bahasa Indonesia jang dilakukan dengan insjaf dan menurut rentjana jang teratur, berdasarkan kesadaran dan kejakinan berbahasa satu, disertai usaha penjempurnaan Bahasa Indonesia jang harus ditjantumkan sebagai atjara penting dalam rangka pembangunan nasional.
3. Politik bahasa jang tegas jang mampu menjuburkan rasa tjinta kepada bahasa Indonesia dan jang sanggup melenjapkan rasa kurang-harga-diri, terhadap bahasa asing, hendaklah mengatur kedudukan Bahasa Indonesia dan hubungan bahasa ini dengan bahasa-bahasa daerah, baik disekolah, sedjak dari sekolah rendah sampai keperguruan tinggi maupun didalam masyarakat.
4. Sebagai dasar politik bahasa itu hendaklah ditetapkan:
  - a. Sesuai dengan U.U.D.S. R.I. bahasa resmi negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
  - b. Pengembangan Bahasa Indonesia tidak boleh bermaksud menahan perkembangan bahasa-bahasa daerah dan pengembangan bahasa-bahasa daerah tidak boleh pula bermaksud menolak Bahasa Indonesia.



5. Guna memudahkan dan melantarkan perkembangan Bahasa Indonesia mendjadi bahasa pergaulan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai bahasa-ibunja, haruslah ada bimbingan jang njata pada pertumbuhan dan pembinaan Bahasa Indonesia itu.
6. Oleh karena itu seksi mengandjurkan supaya dibentuk suatu Lembaga Bahasa Indonesia jang antara lain dapat diberi tugas sebagai berikut:
  - a. Mengadakan usaha-usaha pemakaian Bahasa Indonesia jang meluas dan mendalam disegala lapangan hidup dan untuk segala lapisan masjarakat.
  - b. Mengadakan usaha mempertinggi nilai dan mutu Bahasa Indonesia dengan memberikan bimbingan jang tegas dalam penggunaan Bahasa Indonesia.
  - c. Dalam waktu sesingkat-singkatnja menjusun suatu tatabahasa Indonesia jang bersahadja dan normatis, terutama untuk dipakai disekolah-sekolah.
  - d. Mengusahakan kesempurnaan edjaan Bahasa Indonesia.
  - e. Mengusahakan adanja penghargaan jang sewadajarnya dari dunia luar.
7. Sekolah-sekolah rakjat jang merupakan pesemaian benih-benih bahasa pergaulan sehari-hari dalam bentuk jang semurni-murninja disamping usaha pemberantasan buta huruf jang didjalankan dengan mempergunakan sematjam basic Indonesia, dan radio, pilem serta persurat-kabaran haruslah dengan insjaf membantu sekuat-kuatnja perkembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia itu.

Untuk mendjamin pemakaian Bahasa Indonesia jang baik di lapangan tersebut di atas, mestilah ada penelitian dan pengawasan jang saksama oleh Lembaga Bahasa Indonesia dan Pemerintah.

#### **Keputusan Seksi D2: Bahasa Indonesia dalam Prosa dan Puisi**

Seksi D Kongres Bahasa Indonesia 1954, dengan menjesalkan tidak diundangnya para sastrawan Indonesia, setelah dalam sidangnya memperbintjangkan preadvis Bahrum Rangkuti tentang "Bahasa Indonesia dalam prosa dan puisi", mengambil keputusan-keputusan jang dapat

dirumuskan sbb.:

1. Beda Bahasa Indonesia dari Bahasa Melaju njata sekali dalam prosa dan puisinja, djadi dalam kesusasteraannja. Dapatlah dikatakan bahwa Bahasa Indonesia dalam kesusasteraannja lebih banjak variasinja dari Bahasa Melaju dalam seni prosa dan puisinja. Meskipun begitu masih banjak djenis kesusasteraan Melaju klasik jang patut mendjadi perhatian, bahkan mungkin mendjadi perangsang bagi perkembangan kesusasteraan Bahasa Indonesia.
2. Perlu diadakan Balai Penterdjemahan Sastra jang bertugas mengusahakan terdjemahan hasil-hasil sastra dunia dan sastra daerah Indonesia.
3. Perlu dilakukan penjelidikan jang luas dan mendalam tentang kesusasteraan bahasa-bahasa Indonesia dan hasil kesusasteraan bahasa-bahasa tetangga (India, Farsi, Arab, dsb.) jang zat-zatnja ada mengesahkan pengaruh pada sastra Melaju klasik maupun Indonesia modern.
4. Perlu diterbitkan naskah kepustakaan Melaju klasik disamping hasil-hasil kesusasteraan Indonesia modern. Demikian djuga berbagai pendapat para sardjana dan sastrawan mengenai hasil kesusasteraan Melaju klasik dan bahasa Indonesia jang tersebar di berbagai madjalah, naskah dan buku.
5. Perlu diusahakan buku-buku jang menguraikan stilistik Bahasa Indonesia dengan memperhatikan sifat dan luasan kesusasteraan Indonesia dan penjelidikan jang luas tentang logat Bahasa Melaju diberbagai daerah Nusantara (termasuk tanah Melaju) untuk mengetahui inti-hakikat proporsi Bahasa Indonesia.
6. Perlu diwujudkan perpustakaan kesusasteraan jang lengkap disekolah, baik rendah, landjutan maupun seterusnya.
7. Perlu ada usaha menggiatkan tunas muda kesusasteraan Indonesia, antaranja sekolah sandiwara, deklamasi d.s.b.

### **Keputusan Seksi D3: Bahasa Indonesia dalam Pilem**

- I. Jang dimaksud dengan bahasa pilem jaitu salah satu alat pengutaraan pikiran, perasaan, kehendak d.l.l.

Jang dimaksud dengan bahasa dalam pilem jaitu salah satu unsur bahasa pilem disamping gambaran dan bunji-bunjian lain. Bahasa dalam pilem dapat terdiri dari pertjakapan, komentar, pentjeritaan d.l.l.

- II. Pilem diakui sebagai salah satu alat penting untuk menjebarkan dan mengembangkan bahasa Indonesia serta membuat bahasa Indonesia populer dikalangan segala lapisan masjarakat diseluruh tanah air.
- III. Pilem dapat membantu proses pertumbuhan Bahasa Indonesia Umum a.l. dengan mentjernakan bahasa-bahasa daerah, baik dalam idiomnja, istilahnja, tjara pengutjapannja dll., kedalam Bahasa Indonesia.
- IV. Tidaklah sewadjarnja diadakan suatu paksaan untuk mendapatkan bahasa Indonesia jang sedjenis (uniform) untuk pilem, karena dalam mentjiptakan sebuah pilem haruslah disesuaikan bahasanja dengan ragam tjeritera, jang berbeda-beda menurut suasana dan daerah. Djuga karena paksaan sematjam itu bertentangan dengan dasar pentjiptaan seni setjara bebas.
- V. Mengandjurkan kepada pembuat-pembuat pilem untuk memakai Bahasa Indonesia jang baik, jang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu hasil pentjiptaan seni jang sempurna.
- VI. Karena fungsinja jang penting itu, sewadjarnjalah persoalan pilem lebih banjak mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama dari Kem. P.P. dan K. dengan tjara mendjalankan politik pilem jang lebih aktif.
- VII. Supaja teks terdjemahan pilem luar negeri diperhatikan oleh Panitia Sensor Pilem.
- VIII. Untuk mendjaga pemakaian Bahasa Indonesia jang baik dalam pilem supaja bahasa dalam pilem itu melalui Panitia Sensor Pilem Indonesia.

## **Keputusan Seksi E: Fungsi didalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam Penjiaran Radio**

Seksi E dari Kongres Bahasa Indonesia yang bersidang pada tanggal 30 dan 31 Oktober 1954 bertempat di Balai Wartawan dan Balai Polisi di Medan, setelah menerima baik praeadvies<sup>2</sup> tentang Fungsi Bahasa di dalam Pers, Bahasa Indonesia dalam Pers dan Bahasa Indonesia dalam penjiaran radio, dengan suara bulat telah memutuskan untuk mengandjurkan kepada sidang Kongres supaya mengambil resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio, sebagai berikut.

### **Resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio**

#### **Memperhatikan:**

Tudjuan Kongres yang dimaksudkan menindjau kedudukan dan kegunaan bahasa Indonesia dalam segenap lapangan hidup, baik sebagai bahasa pergaulan maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan, agar mendjadi pegangan bagi penjelidikan selandjutnja dinegeri kita dan akan berharga pula bagi penjelidikan bahasa di-negara<sup>2</sup> tetangga.

#### **Mengingat:**

- (1) Pers dan Radio bertugas melaksanakan alat hubungan semesta (mass-communication),
- (2) Bahasa itu merupakan alat dari pada Pers dan Radio,
- (3) Alat daripada Pers dan Radio Indonesia adalah Bahasa Indonesia,
- (4) Tatabahasa pada hakikatnja melukiskan pertumbuhan bahasa didalam masjarakat (deskriptif) dengan teliti.

#### **Menimbang:**

- (1) Pers dan Radio wadajib dan berhak melaksanakan tugasnja dengan sebaik<sup>2</sup>nja,
- (2) Bahasa sebagai alat Pers dan Radio harus dibuat seefektif<sup>2</sup>nja atau

didjadikan se-baik2nja.

- (3) Kebaikan bahasa sebagai alat Pers dan Radio terletak pada sifat mudah dan djelas,
- (4) Sifat mudah dan djelas itu terdjadi djika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnja kata2, langgam2, gaja dan ungkapan2 baru didalam masjarakat.

Menjatakan pendapat sebagai berikut:

- (1) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio tak dapat dianggap sebagai bahasa jang tak terpelihara dan rusak,
- (2) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio adalah bahasa masjarakat umum jang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masjarakat,
- (3) Pers dan Radio hendaknja sedapat mungkin berusaha memperhatikan tatabahasa jang resmi,
- (4) Menganggap perlu supaja diandjurkan adanja kerdjasama jang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai2 Bahasa.

Medan, 1 Nopember

1954

Pimpinan Kongres

1. Mr. Mahadi
2. Dr. A. Sofjan
3. Prof. Prijana

#### Catatan

Latar belakang Kongres Bahasa Indonesia I di Solo itu termuat dalam buku *Soemanag, sebuah biografi* oleh Soebagijo I.N.

Prasaran tokoh-tokoh bahasa dalam Kongres Bahasa Indonesia I dimuat dalam *Hasil Kongres Bahasa Indonesia Pertama dan Kongres Bahasa Indonesia Kedua* yang diterbitkan oleh Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1978).

Segala sesuatu tentang Kongres Bahasa Indonesia II di Medan dapat

diketahui dengan membaca madjalah *Medan Bahasa* jilid IV (1954), majalah *Pembina Bahasa Indonesia* jilid VII (1955), buku *Kongres Bahasa Indonesia di Medan peristiwa jang tiada bandingannja* terbitan Djambatan (1955), dan buku *Kongres Bahasa di Kota Medan 28 Oktober - 2 Nopember 1954* terbitan Panitia Penyelenggara Kongres, Djawatan Kebudayaan Kementerian PPK (1955).

## **KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA III**

### **Jakarta, 28 Oktober--3 November 1978**

Kongres Bahasa Indonesia III, yang berlangsung dari Sabtu tanggal 28 Oktober sampai dengan hari Jumat tanggal 3 November 1978 di Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia III oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 28 Oktober 1978 dan pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daed Joesoef, pada tanggal 30 Oktober 1978, serta setelah mendengarkan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas secara mendalam, baik dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan:

1. kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional;
2. bidang pendidikan;
3. bidang komunikasi;
4. bidang kesenian;
5. bidang linguistik;
6. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

#### **I. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Kebijakan Kebudayaan, Keagamaan, Sosial, Politik, dan Ketahanan Nasional**

##### **a. Kesimpulan Umum**

Bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama bahasa merupakan sarana

pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dari kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebudayaan. Perkembangan kebudayaan Indonesia ke arah peradaban modern sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecermatan, ketepatan, dan kesanggupan menyatakan isi pikiran secara eksplisit. Ciri-ciri cara berpikir dan mengungkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi masyarakat Indonesia. Selain itu, mutu dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan perlu pula ditingkatkan. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia memiliki kesanggupan menyatakan dengan tegas, jelas, dan eksplisit konsep-konsep yang rumit dan abstrak serta hubungan antara konsep-konsep itu satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini harus dijaga agar senantiasa terdapat keseimbangan antara kesanggupan bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan identitasnya sebagai bahasa nasional Indonesia.

Identitas kebangsaan Indonesia dimanifestasikan bukan saja oleh bahasa Indonesia, melainkan juga oleh bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sesuai dengan penjelasan Bab XV Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hubungan ini diperlukan adanya keseimbangan antara sikap bahasa yang positif, baik terhadap bahasa Indonesia maupun terhadap bahasa daerah dan perilaku berbahasa, dan antara sikap bahasa perseorangan dan sikap bahasa bangsa yang dinyatakan di dalam kebijaksanaan bahasa nasional. Sejarah kebangsaan Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia memiliki hubungan isi-mengisi dengan perkembangan kehidupan pedesaan, serta kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik telah mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi antardaerah, antarsuku, dan



antarbudaya telah memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik seperti yang kita miliki hingga saat ini. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia yang semula merupakan sarana pembebasan dari kekangan stratifikasi sosial, dewasa ini menunjukkan kecenderungan ke arah pembedaan kedudukan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan ini perlu diatasi demi keutuhan identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis.

Di dalam hubungan dengan peningkatan isi dan makna kemerdekaan Indonesia bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan peningkatan kewibawaan serta identitas bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, terutama dalam lingkungan Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bahasa Indonesia merupakan sarana yang diandalkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamik yang ditandai oleh adanya keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Hanya dengan wibawa yang besar dan identitas yang tegas dan nyata, bangsa Indonesia dapat memainkan peranan yang berpengaruh di dalam pergaulan masyarakat dunia.

Bahasa Indonesia dapat dikembangkan dan diperkaya dengan unsur-unsur bahasa daerah dan, apabila perlu, dengan unsur-unsur bahasa asing. Unsur-unsur serapan itu haruslah terbatas pada unsur-unsur yang sangat diperlukan dan yang padanannya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia.

### ***b. Tindak Lanjut***

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Oleh karena kebijaksanaan bahasa nasional merupakan bagian integral kebijaksanaan kebudayaan nasional, dan disusun dalam konteks kebijaksanaan kebudayaan nasional itu, maka perlu segera diadakan Kongres Kebudayaan Nasional dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.
- (2) Pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional memerlukan partisipasi

segenap lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini perlu dibentuk Dewan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

- (3) Sikap bahasa yang positif, perilaku berbahasa, dan kebiasaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mencapai tujuan ini perlu dikembangkan lingkungan yang positif pula. Dalam hubungan ini, iklan serta papan nama toko, perusahaan, dan lain-lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu diindonesiakan.
- (4) Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir ilmiah, buku-buku dan bahan kepustakaan ilmiah lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu disebarluaskan dengan jalan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu segera dibentuk Badan Penerjemahan Nasional dengan wewenang, dana, dan tenaga profesional yang cukup.
- (5) Keseimbangan antara sikap bahasa yang positif dan perilaku berbahasa dapat dicapai dengan menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dalam sektor pemerintah, baik dalam lingkungan sipil maupun dalam lingkungan militer serta dalam sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan sarana perundang-undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran bahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian.

## **II. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Pendidikan**

### **a. Kesimpulan Umum**

Perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki dewasa ini telah dimungkinkan oleh usaha para pendidik. Sebaliknya, perkembangan pendidikan kebangsaan kita telah dimungkinkan berkat adanya bahasa

## Indonesia.

Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, dan (2) bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang sekolah.

Bahasa daerah masih dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah dapat pula diajarkan sebagai mata pelajaran.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah untuk sarana komunikasi antarbangsa dan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari buku buku berbahasa asing.

Sehubungan dengan pemakaian tiga kelompok bahasa yang dikemukakan di atas, hal yang tidak menggembirakan ialah kenyataan bahwa pada sebagian anggota masyarakat terjadi percampuran pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan bahasa asing mungkin dapat diatasi dengan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh semua guru.

Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang berjalan secara alamiah jalin-berjalin dengan perkembangan persepsi, daya abstraksi, perasaan, dan pengetahuan seorang anak. Oleh karena itu, proses belajar-mengajar bahasa Indonesia dengan pendekatan makro yang mencakup pembinaan melalui semua mata pelajaran dan lingkungan sosial yang lebih luas akan lebih menguntungkan.

Masukan (*input*) instrumental pendidikan bahasa mencakup kurikulum, guru, dan sarana pendidikan. Kurikulum pendidikan bahasa Indonesia pada semua jenjang sekolah harus berkesinambungan. Guru yang memegang peranan kunci dalam proses mengajar tidak selalu menggembirakan kualifikasi dan jumlahnya. Demikian pula halnya dengan sarana pendidikan seperti buku-buku pelajaran dan buku bacaan.

Khusus mengenai buku-buku terdapat beberapa masalah. Pertama,

jumlah dan jenis buku yang diperlukan oleh guru dan murid belum memadai. Kedua, perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab untuk pembinaan buku-buku dan media bacaan lainnya belum berkembang sebagaimana mestinya; petugas perpustakaan sangat kurang. Ketiga, buku-buku pelajaran masih banyak yang belum memenuhi syarat, baik dari segi ejaan dan tanda baca maupun dari segi bahasa dan isinya.

Minat baca di kalangan murid pada umumnya cukup memadai, kecuali minat baca untuk buku ilmu pengetahuan. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan minat baca ternyata masih kurang dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Pelajaran sastra belum merupakan mata pelajaran yang mandiri. Sastra diajarkan sebagai sambilan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pengajar dan buku yang diperlukan masih kurang.

Keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan ternyata belum memenuhi syarat minimum bagi penggunaan bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan pendidikan tinggi maupun untuk kepentingan komunikasi umum di dalam masyarakat. Keadaan ini perlu segera diatasi.

Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat umum, termasuk para pejabat, di luar lembaga pendidikan formal perlu ditingkatkan.

### ***b. Tindak Lanjut***

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk meningkatkan mutu keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan mutu pelajaran harus segera diperbaiki dengan jalan menyediakan bahan pengajaran yang bermutu, mengembangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih baik, dan meningkatkan mutu pendidikan guru sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan lanjutan. Selain itu, guru-guru terutama guru-guru bahasa Indonesia harus segera diberi penataran dalam keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan

benar, penggunaan metode dan sarana pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan pengembangan inovasi pendidikan kebahasaan.

- 2) Kebiasaan dan keterampilan menulis, termasuk menulis laporan ilmiah, harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, perlu pula dikembangkan keterampilan membaca cepat.
- (3) Perlu segera diadakan penelitian mengenai masalah-masalah konkret tentang keserasian kurikulum bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang sekolah dan kemampuan sarana penunjang seperti buku-buku murid, penuntun guru, perpustakaan, dan alat peraga.
- (4) Peranan perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan dan buku-buku dilengkapi. Guru perlu ditatar untuk menjadi guru pustakawan.
- (5) Buku-buku pelajaran perlu diteliti dan dievaluasi ketepatan isinya dan keserasian bahasanya. Harga buku perlu diturunkan agar dapat terjangkau oleh daya beli orang tua murid.
- (6) Keragaman buku pelajaran untuk murid-murid yang berbeda latar belakang bahasa ibunya atau tingkat kemampuan bahasa Indonesianya perlu dikembangkan.
- (7) Untuk mempercepat proses evaluasi buku, maka wewenang pelaksanaannya perlu diserahkan kepada tim daerah. Tim ini dapat dibentuk pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keanggotaan tim harus mewakili ahli bahasa, ahli pendidikan, dan ahli bidang studi yang bersangkutan.
- (8) Untuk menghilangkan keraguan di lapangan, perlu dikeluarkan petunjuk yang jelas tentang masalah bahasa pengantar di sekolah, termasuk kedudukan bahasa daerah sebagai pembantu bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah dasar.
- (9) Dalam rangka peningkatan pengajaran sastra, perlu disusun kurikulum yang serasi.
- (10) Dalam rangka penerapan pendekatan makro, perlu disusun pedoman untuk kepala sekolah dan para guru. Tugas guru yang mengajarkan bidang studi nonbahasa adalah mengembangkan kemampuan murid dalam memahami uraian lisan dan bahan bacaan dalam bidang studi

masing-masing dengan tepat. Juga diperlukan latihan melakukan sintesis, analisis, dan evaluasi konsep-konsep dalam bidang studi dengan bahasa yang tepat.

- (11) Perlu ada kebijaksanaan yang menyeluruh tentang pembinaan guru bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan guru dengan baik, perlu dipikirkan masalah calon guru di SPG dan IKIP, masalah pengangkatan dan pembinaan karier melalui penataran, dan pendidikan lanjutan.
- (12) Sehubungan dengan pendidikan luar sekolah, perlu ditingkatkan pemberantasan buta huruf Latin dan buta bahasa Indonesia.
- (13) Dalam rangka pembinaan bahasa daerah, perlu diberikan tempat dan waktu yang wajar padanya dalam kurikulum sekolah.
- (14) Mutu pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris perlu segera ditingkatkan dengan tujuan memungkinkan penggunaannya sebagai sarana penggali kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta sarana komunikasi antarbangsa.

### **III. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Komunikasi**

#### ***a. Kesimpulan Umum***

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam hubungan itu media massa telah memberikan sumbangan yang berharga dengan pertumbuhan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dalam ragam lisan belum ada lafal baku. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai bahasa daerah atau bahasa asing.

**b. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya.
- (2) Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.
- (3) Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
- (4) Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- (5) Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
- (6) Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan "Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.
- (7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian, antara lain, untuk penyiar televisi dan radio.
- (8) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, televisi, serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

#### **IV. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Kesenian**

##### **a. Kesimpulan Umum**

Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam banyak karya sastra, cerita anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya ketimpangan. Dalam hal sastra dan buku anak-anak, hal itu disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarang kita, di samping masih tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan.

Dalam hal penerbitan cerita anak-anak, pengarang perlu memberi keleluasan kepada penerbit untuk mengubah bahasa karangannya agar sesuai dengan usia dan lingkungan anak-anak. Bacaan anak-anak memegang peranan penting dalam usaha peningkatan imajinasi dan kecerdasan anak; dengan demikian, kecermatan pemakaian bahasa merupakan faktor yang sangat penting. Dalam syair lagu ketimpangan itu, antara lain, diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang pasti tentang aksentasi bahasa Indonesia sehingga para komponis tidak mempunyai pegangan untuk menyesuaikan dengan melodi.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam film belum dilakukan sebaik-baiknya sebab film lebih banyak merupakan barang dagangan pemburu keuntungan bagi pengusaha; penulis skenario yang dipilihnya kebanyakan tidak menguasai teknik penulisan yang baik.

Bahasa Indonesia semakin banyak juga dipergunakan untuk menerjemahkan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarluaskan jangkauan teater-teater tradisional, yaitu dengan cara mengindonesiakan cakupannya kadang-kadang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena itu, pengindonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan dan pengembangan kesenian, dan seniman.



## **b. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungannya dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah-sekolah.
- (2) Menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai.
- (3) Menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah.
- (4) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Merangsang penelitian dan pendalaman karya-karya sastra daerah yang bersangkutan.
- (6) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia atau daerah.
- (7) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan daerah ke dalam bahasa-bahasa asing.
- (8) Menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan mudah dan murah.
- (9) Menggiatkan dan merangsang kreativitas para sastrawan kita dengan menyediakan sarana untuk itu, misalnya, berupa majalah sastra dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.
- (10) Mengadakan kegiatan pertemuan antara sastrawan, ahli sastra, dan calon penggemar sastra (dalam rangka memasyarakatkan apresiasi sastra).
- (11) Mewajibkan para penerbit memiliki editor.
- (12) Mengadakan penataran untuk tenaga editor.
- (13) Menggunakan tenaga editor yang diakui oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- (14) Melakukan perekaman teater tradisional untuk kemudian diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (15) Mengadakan penelitian mengenai penggunaan syair untuk lagu-lagu Indonesia, yang hasilnya dapat digunakan sebagai pengarah penciptaan lagu.
- (16) Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia

yang sudah ada, dan apabila ada kaidah yang sudah tidak sesuai lagi, maka kaidah itu sebaiknya diperbaiki.

- (17) Memberi rangsangan kepada pengarang-pengarang yang menyumbangkan tulisan-tulisan berharga kepada media massa.
- (18) Meningkatkan kecermatan pemakaian bahasa dalam bacaan anak-anak, termasuk penyesuaian dengan usia anak-anak.
- (19) Menumbuhkan kerja sama antara penerbit bacaan anak-anak dengan lembaga-lembaga pendidikan dan psikologi yang ada.
- (20) Perpustakaan sekolah hendaknya benar-benar terbuka bagi anak didik.

## **V. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan Kaitannya dengan Bidang Linguistik**

### **a. Kesimpulan Umum**

Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat menunjukkan perkembangan berbagai ragam bahasa yang kaidah-kaidahnya lebih rumit daripada yang disangka orang. Kaidah bahasa yang tercantum dalam buku tata bahasa dan yang diajarkan di sekolah, tidak sepenuhnya lagi mencerminkan kenyataan orang berbahasa dewasa ini. Ketidakserasian antara kaidah dan pemakaian bahasa yang beragam-ragam itu kadangkadang melahirkan kesangsian orang dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Usaha agar Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diterapkan secara sadar dan mantap oleh berbagai golongan dan lingkungan masyarakat dalam ragam bahasa tulisan belum berhasil seperti yang diharapkan.

Pengembangan kosakata Indonesia yang tidak dilandasi oleh wawasan bahasa yang baik kadang-kadang menjurus ke pertumbuhan yang kurang teratur.

### **b. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum adalah sebagai berikut.

- (1) Penguasaan kaidah ejaan resmi dan lafal yang baku perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas, termasuk instansi Pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan sarana komunikasi massa.
- (2) Tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dengan cara yang memadai perlu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Tata bahasa deskriptif itu kemudian dijabarkan untuk pelbagai tujuan pedagogis atau tujuan praktis.
- (3) Kamus baku bahasa Indonesia perlu segera diterbitkan dan disebarluaskan. Untuk tujuan itu penelitian di bidang leksikologi perlu dilaksanakan dan para ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan diikutsertakan.
- (4) Kerja sama penelitian antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga pendidikan tinggi perlu ditingkatkan.
- (5) Akronim yang dipakai di luar lingkungan khusus hendaknya disertai bentuk lengkapnya jika mungkin terjadi gangguan komunikasi.
- (6) Pembakuan dan modernisasi segala segi bahasa Indonesia perlu digalakkan dengan tujuan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia baku di dalam segala kegiatan pemakaiannya.
- (7) Perlu diadakan penelitian mengenai berbagai segi bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata ganti dan sapaan dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat.
- (8) Perlu diatur transliterasi tulisan Arab untuk kepentingan keagamaan, ilmiah, dan umum.

## **VI. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Ilmu dan Teknologi**

### **a. Kesimpulan Umum**

Oleh karena antara bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan yang erat, maka keberhasilan dari pemodernan itu sangat bergantung kepada corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintesis antara

nilai-nilai yang berakar pada kebudayaan etnis yang tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses sintesis itu dipikirkan sebagai suatu proses yang mempertinggi potensi kreatif yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting dalam modernisasi, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimasyarakatkan secara luas. Pemasyarakatan ini hanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien apabila bahasa berfungsi sebagai penyebar konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemakai bahasa keilmuan di Indonesia adalah ketidakseragaman istilah dan penamaan dalam satu bidang disiplin sekalipun. Di dalam masing-masing ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat kecenderungan untuk membuat istilah-istilah dan tata nama yang berbeda-beda.

Di samping ini perlu pula diperhitungkan adanya sistem tata nama internasional. Jadi, banyak istilah yang mudah dibuat di dalam suatu kalangan tidak diketahui oleh kalangan itu.

Pengadaan buku pelajaran ilmiah dalam bentuk karya asli perlu digalakkan. Potensi ke arah ini sudah kelihatan mulai berkembang. Faktor-faktor penghambat tampaknya terletak, antara lain, di luar bidang ilmiah, misalnya:

- a. kreativitas di bidang lain adalah lebih produktif secara material; dan
- b. uluran tangan dari pihak Pemerintah hingga saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu seperti ilmu hukum banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus diperbaiki dan dibakukan.

Penggunaan akronim hendaklah terbatas pada lingkungan kedinasan yang bersangkutan saja.

Penggunaan akronim di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, misalnya, di dalam media massa hendaklah dihindari. Apabila akronim digunakan di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, akronim itu hendaklah dilengkapi dengan bentuk penuhnya.

Dasar dan penamaan bilangan di dalam bahasa Indonesia perlu ditinjau kembali.

Untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Inggris.

#### ***b. Tindak Lanjut***

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Usaha pemodernan bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan tercapainya keselarasan dengan:
  - a. nilai-nilai yang telah memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern;
  - b. nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan etnis.
- (2) Pemerintah dan masyarakat ilmuwan perlu berusaha untuk segera menyeragamkan peristilahan, baik dalam satu disiplin maupun antardisiplin yang berdekatan dan agar istilah-istilah internasional digunakan di samping istilah-istilah bahasa Indonesia.
- (3) Dalam semua jenjang pendidikan, khususnya sejak sekolah lanjutan, perlu diusahakan keseimbangan antara pendidikan bahasa, matematika, dan logika supaya pemikiran bangsa Indonesia dapat mengimbangi kemajuan zaman.
- (4) Supaya Pemerintah menumbuhkan satu badan khusus yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerjemah.
- (5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mendukung usaha swasta di bidang penerjemahan yang telah nyata-nyata menunjukkan kemampuan.
- (6) Untuk penulisan karya asli dan saduran tidak perlu ditentukan "target". Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digarap dan penulisannya ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap ahli. Penulis hendaknya dibebaskan dari tugas rutinnnya (*sabbatical leave*). Sehubungan dengan penulisan karya asli ini, perlu diadakan latihan penulisan buku (*textbook writing*).

- (7) Pengadaan pedoman khusus untuk pembentukan istilah-istilah dan tata nama dalam masing-masing bidang ilmu hendaknya dijabarkan dari pedoman umum pembentukan istilah yang telah disepakati.
- (8) Desimal hendaknya dinyatakan dengan titik (.) bukan koma (,) sehingga 0,9 menjadi 0.9.
- (9) Sebagai pengejawantahan Kongres Bahasa Indonesia III agar pada awal Pelita III digalakkan penerjemahan besar-besaran.
- (10) Agar dibentuk badan pertimbangan yang anggotanya terdiri dari para ahli pelbagai bidang ilmu yang bekerja dalam 2 tahap, yaitu: (a) memilih dan menyebarluaskan istilah dan (b) menampung pendapat (tanggapan) masyarakat serta menetapkan istilah yang akan dipakai.
- (11) Penamaan bilangan besar Amerika yang sama dengan penamaan bilangan besar dalam bahasa Prancis dan Rusia hendaklah dijadikan dasar penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia (contoh: miliun, biliun, triliun, dan seterusnya).
- (12) Bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan sistem penamaan bilangan antara sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur, yang lebih mudah diterima oleh anak-anak, di samping menggunakan sistem yang berlaku sekarang.
- (13) Pengejaan nama bilangan hendaknya dilakukan dengan mengingat fungsi aditif dan multiplikatif angka-angka yang terdapat dalam tubuh lambang bilangan itu. Yang bersifat aditif ditulis terpisah, sedangkan yang bersifat multiplikatif dirangkaikan (contoh: 23 = duapuluh tiga).
- (14) Penggunaan angka 2 untuk menyatakan kata ulang dan penggunaan huruf x di dalam ejaan bahasa Indonesia (Ejaan yang Disempurnakan) sebaiknya ditinjau kembali.

# **KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA IV**

## **Jakarta, 21--26 November 1983**

### **Pendahuluan**

Kongres Bahasa Indonesia IV berlangsung dari hari Senin tanggal 21 November 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintah, departemen dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, para ilmuwan yang mewakili pelbagai bidang ilmu dan teknologi, serta peminat lain dari dalam dan luar negeri. Dengan memperhatikan pidato pengarahan dalam peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV oleh Menteri Nugroho Notosusanto, pada tanggal 21 November 1983, **serta** setelah mendengarkan makalah-makalah yang disajikan dan dibahas secara saksama baik di dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia IV mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu:

1. sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. sarana pengembangan kebudayaan;
3. sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; **serta**
4. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

### **A. Bidang Bahasa**

#### **1. Kesimpulan Umum**

Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional

pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari satu latar belakang bahasa di Tanah Air berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa Indonesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuhan dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lainnya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai alat pengungkap dengan alam sekitar dan fenomena sosial sebagai isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbulkan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan saksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragam itu menyimpang terlalu jauh dari poros inti bahasa kita.

Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup banyak pemakai bahasa Indonesia yang belum dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara mereka adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cendekiawan, dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpengaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada:

1. pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelompokan wacana yang tidak mengungkapkan jalan pikiran yang jernih, logis, dan sistematis;
2. pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang telah umum dipakai;
3. pemakaian istilah teknis yang tidak seragam dalam ilmu pengetahuan;
4. pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap baku;



5. pengejaan kata atau frase yang tidak taat asas.

## **2. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan berbagai ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan.
2. Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang dianggap baku, kategori sintaksis setiap kata, dan batasan serta contoh pemakaian yang lebih lengkap. Jika mungkin, kamus ini perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai asal kata.
3. Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional.
4. Perlu digiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi pelbagai bidang.
5. Lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan nondepartemen) dan instansi-instansi swasta yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk menyeragamkan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan dan penyeragaman istilah serta tata nama hendaknya dibuat dengan kerangka pemerian bahwa istilah-istilah itu perlu memenuhi selera naluri para pemakainya sehingga dapat benar-benar diterima dan dipakai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditugaskan mengkoordinasikan kerja sama itu dan menyebarluaskan hasilnya
6. Sikap hati-hati dalam memilih unsur-unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan.
7. Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
8. Perlu ditetapkan pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia.

## **B. Pengajaran Bahasa**

### **1. Kesimpulan Umum**

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari sudut penutur bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Tercapainya pemilikan keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sah.
3. Tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang tampak dari perilaku sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ialah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai bahasa penalaran, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri hasil pendidikan.

Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang diajarkan adalah:

1. bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun ragam tulis;
2. bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa modern.

Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkap pengembangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai di lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu mempunyai kemampuan menyampaikan

- informasi secara tepat dengan berbagai konotasi;
2. mempunyai bentuk estetik;
  3. mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;
  4. mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.

Keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat majemuk dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang banyak, yang tersebar di seluruh tanah air, belum dimanfaatkan dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri.

Pengajaran sastra di sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran bahasa belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan nilai kehidupan dan kebudayaan.

Pola kebijaksanaan nasional mengenai pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah sebuah strategi yang memandu pendidik bahasa Indonesia di dalam mengembangkan tindakan yang mendasar dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

## **2. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Dengan memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III, diusulkan agar mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, seperti (a) peningkatan kemampuan guru bahasa Indonesia, (b) pengembangan bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif bahasa, kebudayaan, serta penalaran, dan (c) pemberian pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh keterampilan dalam proses belajar bahasa Indonesia.
2. Dengan tujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, pola kebijaksanaan nasional

kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentuan strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa yang secara berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar dan menengah, (b) pengembangan tata bahasa panutan, (c) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar, (d) pemantapan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat membantu terlaksananya unsur humaniora dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan.
4. Bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam rangka mengimbangi laju perkembangan karya ilmiah, pengajaran membaca cepat perlu dikembangkan secara khusus.
5. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaklah memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan nasional di bidang kebudayaan, khususnya sektor kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien dan (b) kemampuan warga masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat.
6. Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di lingkungan keluarga.
7. Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada kemampuan berbahasa secara umum di sekolah dasar dan menengah, perlu dikembangkan bahan pengajaran bahasa yang diperlukan bagi bidang-bidang khusus.
8. Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strateginya bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif.
9. Di dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya dimasukkan

program pendidikan bahasa Indonesia.

10. Hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaklah disebarluaskan dan dimanfaatkan.
11. Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyukseskan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

## **C. Pembinaan Bahasa**

### ***1. Kesimpulan Umum***

Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi modern.

Kenyataan yang dihadapi oleh para pembina bahasa ialah pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, belum menggembirakan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus terus diperbaiki dan usaha pembakuannya ditingkatkan. Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecenderungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak

perlu. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat menunjukkan peningkatan yang pesat dan jumlah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama semakin meningkat. Namun, tingkat kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu mendapat perhatian para pendidik dan pemakai bahasa Indonesia.

## **2. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama bidang hukum dan perundang-undangan, perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, bertahap, dan terpadu karena hukum yang dimengerti oleh setiap anggota masyarakat akan lebih menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara mantap, lancar, dan tertib.
2. Semua aparatur pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.
3. Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerang, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara perlu segera ditempuh ialah bahwa setiap departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setiap petugas atau anggota dalam badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pembangunan.
4. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama di

negara Republik Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha (nama badan usaha, iklan, dan papan pengumuman untuk masyarakat luas), harus segera diusahakan pengantiannya dengan kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama yang terpadu antara berbagai instansi (Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat) sangat diperlukan.

5. Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin berbahasa yang dapat membanggakan.
6. Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik Pemerintah maupun swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau pemanfaatan ahli bahasa secara maksimum pada berbagai sektor pembangunan.
7. Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang tingkat keahamannya berbahasa Indonesia masih rendah.
8. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dimantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, sekurang-kurangnya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional.
9. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan terus, terutama dalam Bulan Bahasa (bulan Oktober setiap tahun).
10. Kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia para guru, terutama guru bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, di samping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia.
11. Buku-buku yang diterbitkan--baik yang asli maupun yang terjemahan--, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
12. Usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan diarahkan



sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia para pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat ditingkatkan secara mantap. Guna memungkinkan tercapainya tujuan itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informasi perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, usaha memasyarakatkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu dapat mencapai dan dijangkau masyarakat luas.

13. Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah yang dimaksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaklah dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemampuan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.
14. Hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjang dengan instruksi pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi.
15. Kongres Bahasa Indonesia IV memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga nondepartemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdayaguna.
16. Kongres mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konsep Wawasan Nusantara karena bahasa Indonesia merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam kehidupan bangsa dan negara.
17. Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu diperoleh



data kebahasaan yang sahih dan lengkap. Data yang demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

18. Kongres menugaskan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia IV dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa Indonesia V yang akan datang.
19. Ketentuan mengenai lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang tertulis dalam bahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, perlu ditinjau kembali.

# **KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA V**

## **Jakarta, 28 Oktober--3 November 1988**

### **Pendahuluan**

Kongres Bahasa Indonesia V yang pembukaannya diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988 dan sidang-sidangnya yang berlangsung hingga hari Kamis tanggal 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 28 Oktober 1988, pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, pada tanggal 29 Oktober 1988, dan setelah memperhatikan laporan Kepala Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Anton M. Moeliono, serta mendengarkan dan membahas secara saksama makalah yang disajikan,, baik dalam sidang lengkap maupun dalam sidang kelompok, yang berkaitan dengan:

a. garis haluan:

1. perencanaan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing);
2. pengajaran;
3. bahasa Indonesia di luar jalur formal;
4. sarana penunjang;
5. kerja sama kebahasaan dalam dan luar negeri;
6. pembinaan sumber daya manusia dalam pengembangan bahasa Indonesia;
7. penerjemahan;

**b. ranah pemakaian bahasa:**

1. bahasa dan penalaran;
2. bahasa dan ungkapan rasa;
3. bahasa dan kreativitas;
4. peran bahasa Indonesia dalam pembangunan ilmu;
5. peran bahasa daerah dalam pengajaran bahasa Indonesia;
6. sumbangi dan hambatan bahasa asing dalam pengembangan bahasa Indonesia;
7. perkembangan bahasa Indonesia;
8. perkembangan penelitian bahasa Indonesia;
9. laporan penelitian;

**c. pembangunan dan pengembangan sastra:**

1. pemasyarakatan sastra;
2. sastra dalam pendidikan di sekolah dasar;
3. sastra dalam pendidikan di sekolah lanjutan;
4. pengembangan sastra;
5. penelitian sastra;
6. bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra;
7. hubungan sastra Indonesia dan sastra daerah;
8. bahasa Indonesia dalam teater dan film;

**d. bahasa Indonesia di luar negeri**

1. tinjauan dari luar negeri;
2. tinjauan dari dalam negeri;

**telah menmgambil putusan sebagaimana diperinci di bawah ini.**

## **I. BAHASA**

### **A. Simpulan Umum**

Kedudukan bahasa Indonesia kini semakin mantap sebagai wahana komunikasi, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan formal. Pemakaian bahasa Indonesia sejak tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi menunjukkan kemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, masih cukup banyak pemakai bahasa nasional kita yang belum mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan konteks pemakaiannya. Karena itu, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Demikian pula penelitian bahasa Indonesia perlu digalakkan sehingga pengembangan bahasa nasional akan terus berlandaskan temuan penelitian yang terarah dan terpadu.

### **B. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan simpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

1. Dalam konteks budaya yang memberi penekanan pada prinsip anutan, Kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.
2. Karena media massa merupakan komunikator pem bangunan yang memanfaatkan bahasa Indonesia, maka media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.
3. Dalam mengembangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmiah dan modern, janganlah penutur bahasa terjerumus membentuk sikap nasionalisme sempit yang berlebihan (*chauvinisme*). Bahasa Indonesia perlu dikembangkan dan dalam perkembangan itu penuturnya tidak usah takut untuk memungut kata baru, baik yang digali dari bumi sendiri maupun yang dari luar sesuai dengan keadaan dan keperluan.

4. Bahasa Indonesia hendaknya dimasukkan ke dalam delapan jalur pemerataan atau menjadi jalur kesembilan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu digalakkan supaya tidak ada lagi dalam masyarakat Indonesia kelompok yang belum menikmati pemerataan pembangunan.
5. Untuk mengikuti perkembangan ilmu, kegiatan penerjemahan buku asing ke bahasa Indonesia perlu digalakkan. Para ahli bahasa dianjurkan mengadakan kerja sama dengan ahli informatika untuk menjajaki dan mengembangkan mesin penerjemahan. Pendidikan penerjemahan dan penyediaan kamus istilah bidang ilmu menjadi prasyarat yang sangat penting.
6. Badan pemerintah yang mengeluarkan dokumen resmi, seperti undang-undang, hendaknya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia sehingga ragam bahasa bakunya dapat dicontoh masyarakat.
7. Politik perbukuan nasional perlu segera disusun karena penerbitan dan perbukuan di Indonesia yang tidak berkembang akan menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa.
8. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang mempunyai unsur (1) kebanggaan pada bahasa, (2) kesetiaan pada bahasa, dan (3) kesadaran akan norma bahasa, masih perlu dipupuk.
9. Putusan Kongres Bahasa Indonesia IV mengenai penghapusan pemakaian bahasa asing pada papan nama gedung umum, seperti toko, dikukuhkan lagi, dengan menganjurkan kepada semua pemerintah daerah supaya lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai hal tersebut.
10. Pengerahan, pembinaan, dan pendidikan tenaga kebahasaan--termasuk pengaderan--perlu dilakukan dengan berencana.
11. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang konsep-konsep pembangunan harus menggunakan bahasa yang akrab, dan isi pesan pembangunan harus relevan dengan keperluan khalayak serta sesuai dengan daya tangkap masyarakat.
12. Untuk keperluan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia, hendaknya disusun bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional (yang sejenis dengan ujian TOEFL).

13. Penggunaan bahasa ilmiah yang tepat, lugas, dan logis di kalangan peneliti perlu dibiasakan.
14. Mengingat pembinaan umat beragama merupakan bagian yang penting dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan bahasa Indonesia merupakan sarana dalam kehidupan beragama, maka pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan agama harus terus ditingkatkan dan harus dikoordinasi dengan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah umum.
15. Penelitian kebahasaan di Indonesia menghadapi banyak kendala, seperti perpustakaan yang belum memadai, tenaga peneliti yang perlu meningkatkan ilmunya, dan rendahnya kemampuan berbahasa asing peneliti. Instansi pendidikan tinggi diharapkan memperhatikan sarana fisik yang diperlukan dan mengusahakan peningkatan mutu peneliti sehingga penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan segala persyaratannya.
16. Dengan telah diterbitkannya *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diharapkan dapat mengembangkan dan, jika perlu, menyempurnakannya.
17. Untuk buku pelajaran sekolah diperlukan penulisan tata bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memakai *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* sebagai acuan.

## II. SASTRA

### A. *Simpulan Umum*

Sastra, jika ditinjau dari fungsinya, dapat memberikan kepuasan dan pendidikan bagi pembaca. Jika diapresiasi dengan baik, karya sastra dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kehidupan, pengenalan manusia, kebudayaan, kesenian, dan bahasa. Sastra dapat memberikan pelajaran yang praktis tentang berbagai cara menggunakan bahasa. Sastra juga mengembangkan imajinasi dan fantasi--suatu hal yang kerap dilupakan

dalam peningkatan kualitas intelek tual peserta didikan dan pembaca pada umumnya. Karena itu, prosa, puisi, drama, dan karya sastra pada umumnya, selain dapat dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan memanusiakan manusia.

Bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastra menunjukkan adanya tumpang tindih kode ucap sastra yang kadang-kadang menyalahi kaidah bahasa yang baku. Hal itu disebabkan oleh ke perluan penyampaian pikiran dalam karya sastra. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra berbeda dari bahasa dalam karya yang bukan sastra. Karena itu, para pembaca patutlah menyadari hal itu agar tidak selalu ada kesalahpahaman dalam penerimaan maksud dan tujuannya.

Sastra dapat dimanfaatkan dalam pendidikan bangsa. Jadi, mutu karya sastra Indonesia dan daerah, perlu juga ditingkatkan. Penelitian dalam bidang sastra perlu digalakkan agar perkembangan, mutu, bahkan variasi sastra dapat tetap dipantau demi pembinaan dan pengembangan sastra pada umumnya.

## ***B. Tindak Lanjut***

1. Cara konkret untuk menaikkan mutu dan jumlah karya sastra perlu diupayakan.
2. Pendidikan intelektual secara terencana dan terarah perlu dikembangkan agar dapat menumbuhkan selera intelektual dan sekaligus melahirkan minat baca sastra.
3. Tradisi pemasyarakatan sastra melalui forum pertemuan ilmiah, pementasan drama, serta pembacaan sajak dan novel perlu dirintis.
4. Keberanian mengajak semua lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengenal karya sastra perlu dikukuhkan kembali.
5. Untuk menarik minat pembaca terhadap sastra perlu diciptakan terbitan yang memperlihatkan kan "Wajah Indonesia dalam Sastra", yang merupakan hasil penelitian sastra Indonesia, dan "Sastra Budaya Bangsa"; yang merupakan hasil penelitian sastra daerah. Kedua terbitan itu diharapkan dapat ditampilkan pada Kongres Bahasa VI.
6. Perencanaan pembinaan dan pengembangan sastra dalam menentukan

arah perkembangan sastra di Indonesia perlu disusun.

7. Buku teori dan kritik sastra yang relevan dengan karya sastra Indonesia, yang dapat dipakai sebagai acuan bagi para guru sastra dan peneliti sastra perlu disusun.
8. Penelitian puisi, prosa, dan drama perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan pola penelitian sastra yang menyeluruh, terpadu, dan bertahap, dengan program yang terperinci yang dapat memberikan gambaran kesastraan Indonesia.
9. Tenaga peneliti sastra perlu dididik dan dikembangkan wawasannya. Mata kuliah metode penelitian sastra sebaiknya diwajibkan di setiap perguruan tinggi yang mempunyai jurusan sastra dan bahasa agar tumbuh barisan peneliti yang berkualitas.
10. Kritikus sastra perlu disertakan dalam penyusunan kurikulum sekolah lanjutan untuk ikut menentukan karya-karya yang cocok bagi pengajaran.

### III. PENGAJARAN BAHASA

#### A. *Simpulan Umum*

Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterampilan peserta didikan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai tujuan pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum bahasa, buku pelajaran bahasa, metode belajar-mengajar bahasa, guru, lingkungan keluarga serta masyarakat, dan perpustakaan sekolah memegang peranan penting. Kurikulum bahasa harus luwes dan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam kegiatan belajar-mengajar; isi dan cara penyajian buku pelajaran bahasa harus menarik dan menunjang pembinaan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar; metode belajar-mengajar harus dapat menumbuhkan interaksi guru-peserta didikan sedemikian rupa sehingga



mengembangkan didikan kekritisian, kekreatifan, serta keresponsifan peserta didikan dalam menghadapi pelajaran dan kehi dupan; guru bahasa dan guru nonbahasa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat, harus dapat memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar; dan jumlah serta jenis buku perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan.

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat dijadikan mata pelajaran tanpa mengganggu pendidikan bahasa Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, dan sarana lain pendidikan bahasa daerah perlu dikembangkan.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama dengan tujuan membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diungkapkan dalam buku atau terbitan yang berbahasa asing.

## **B. Tindak Lanjut**

1. Kurikulum bahasa yang berlaku di sekolah dasar dan menengah perlu segera disempurnakan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosio-linguistik bahasa serta keluwesan dan kesinambungan isi.
2. Pendidikan dan pengajaran bahasa hendaknya lebih menekankan keterampilan berbahasa dan aspek apresiasi sastra daripada aspek teori kebahasaan.
3. Buku pelajaran bahasa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah dasar dan menengah perlu segera ditingkatkan isi, mutu, serta cara penyajiannya.
4. Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif. Di samping itu, penataran guru bahasa perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan, kurikulum, metode, penyusunan bahan pelajaran.
5. Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di luar jurusan sastra Indonesia hendaknya merupakan kebijakan nasional dan dipadukan

dalam mata kuliah dasar umum.

6. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.
7. Pemerintah Indonesia perlu membantu pengembangan lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama, antara lain dengan ikut menyediakan tenaga pengajar Indonesia untuk mengajar di luar negeri menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
8. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

#### **IV. PENGAJARAN SASTRA**

##### **A. *Simpulan Umum***

Simpulan umum yang ditetapkan dalam pengajaran sastra adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong kreativitas guru dan peserta didik di dalam pelaksanaan pengajaran sastra fungsi kurikulum pengajaran bahasa Indonesia sebagai pedoman pengajaran tidak menjelma menjadi ken doli yang terlalu ketat yang menghilangkan ruang gerak bagi inisiatif guru dan peserta didik.
2. Pengajaran sastra Indonesia sebagai pengajaran yang struktural fungsional dibangun di atas landasan ilmu sastra yang relevan, hasil sastra, dan ilmu pendidikan.
3. Tujuan pengajaran sastra adalah menumbuhkan dan mengembangkan akal budi peserta didik melalui kegiatan pengalaman sastra, yaitu beapresiasi dan berekspresi sastra, dan melalui kegiatan penelaahan masalah sastra sehingga timbul kegemaran membaca dan menghargai sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan.

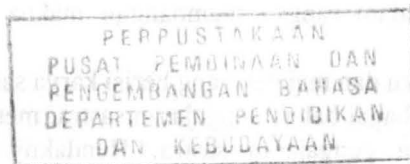
4. Bahan pengajaran sastra selayaknya mencakupi:
  - 1) karya sastra, berupa cerita rekaan, puisi, dan drama, yang telah terpilih dari segi kualitas dengan mempertimbangkan keragaman dalam hal jenis bentuk, tema, serta zaman, dan tingkat kesulitan serta kesesuaiannya dengan keadaan peserta didikan.
  - 2) pengetahuan tentang sastra (teori dan sejarah sastra) sebagai perlengkapan berpikir peserta didikan yang berguna untuk memperoleh pengalaman dan penikmatan sastra yang lebih mendalam. Bahan tersebut dapat menghindari pengetahuan yang semata-mata teoretis yang menjadi beban hafalan.
5. Dalam pengajaran sastra diperlukan proses belajar-mengajar yang sekaligus melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian peserta didikan terhadap sastra secara langsung sehingga terjadi interaksi dinamis antara peserta didikan, karya sastra, dan guru. Kegiatan belajar menjadi media untuk melahirkan dan menguji gagasan serta melakukan penerokaan dan pemikiran lebih lanjut tentang sastra dan hubungannya dengan kehidupannya.
6. Guru sastra memerlukan keleluasan mempersiapkan diri berupa membaca dan memilih karya sastra, menyusun bahan, dan menciptakan model pengajaran, serta melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Tugasnya mengajarkan sastra yang dirangkap dalam mengajarkan bahasa tidak dapat dijalankan dengan leluasa. Karena itu, hendaknya diadakan pembagian tugas di antara para guru, yaitu guru yang bertugas sebagai pengajar sastra dan guru yang bertugas sebagai pengajar bahasa.
7. Para peserta didikan diwajibkan membaca karya sastra yang sudah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra. Di dalam kelas peserta didikan diberi keleluasaan melahirkan pendapatnya sendiri. Dengan bimbingan guru peserta didikan menemukan butir persamaan dari pendapat itu dalam rangka membangun makna sastra bagi dirinya sendiri.
8. Tersedianya buku dan majalah yang berisi karya sastra, khususnya yang telah terpilih sebagai bahan pengajaran sastra, merupakan syarat untuk penyelenggaraan pengajaran sastra. Hendaknya di setiap sekolah tersedia bahan berupa karya sastra dengan jumlah yang mencukupi

keperluan belajar peserta didikan.

9. Hubungan antara sastra Indonesia dan berbagai ragam sastra Nusantara sangat erat. Pengajaran sastra yang memperlakukan karya sastra Indonesia dan daerah dalam satu Wawasan Sastra Nusantara, akan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didikan akan Wawasan Nusantara.

### **B. Tindak Lanjut**

1. Bahan pengajaran sastra selayaknya dikurangi sehingga guru dan peserta didikan untuk melakukan pembinaan dan kreativitas.
2. Para guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan kegiatan membaca karya sastra dan meningkatkan kreativitasnya dalam mengajarkan sastra.
3. Di lingkungan sekolah perlu diambil inisi atif intern untuk mengadakan pembagian tugas di antara para guru sehingga peng ajaran bahasa dan pengajaran sastra tidak dirangkap oleh seorang guru.
4. Hendaknya disusun senarai buku sastra (cerita rekaan, puisi, dan drama) yang wajib dibaca oleh peserta didikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah. Buku karya sastra yang diwajibkan itu harus tersedia di setiap sekolah.
5. Perlu dilakukan penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan.
6. Mengingat pengajaran drama di sekolah harus ditangani oleh orang yang mengerti dan mampu bermain drama, diusulkan agar dibuka jurusan drama di lembaga pendidikan tinggi yang memberikan kewenangan kepada lulusannya untuk menjadi guru drama di sekolah.



07-3786

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 9 | 3 | - | 1443 |
|---|---|---|------|



